

# BAB I

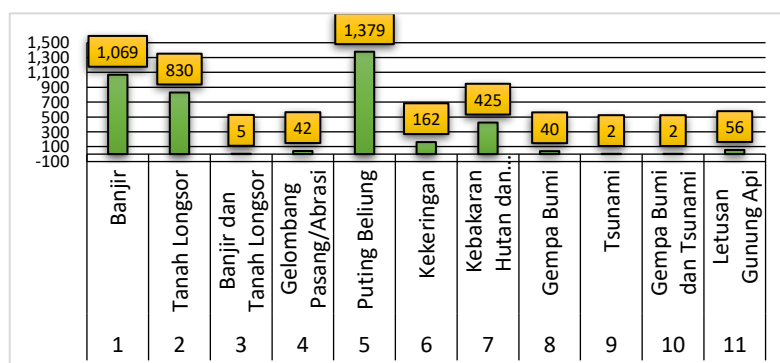
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan bencana di dunia karena terletak pada pertemuan lempeng tektonik aktif, jalur pegunungan aktif, dan Kawasan beriklim tropik. Hal inilah yang menjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam Arifin, (2016). Hasil riset pengurangan resiko bencana oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan Indonesia berada pada urutan pertama sebagai Negara rawan tsunami dan tanah longsor di dunia. Laporan yang sama menempatkan Indonesia pada peringkat tiga dalam bencana gempa bumi. Dan urutan keenam untuk banjir Isa (dalam Hartanto, 2013). Sepanjang tahun 2019 terjadi sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tercatat sejak 1 januari hingga 23 Desember 2019 sekitar 3.721 bencana alam terjadi. Bencana yang terjadi meliputi Kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, gelombang pasang, erupsi gunung berapi, dan di dominasi oleh puting beliung (Kompas.com, 2019).

Tabel 1

Jumlah Bencana Alam di Indonesia Tahun 2018 – 2019



Sumber: BNPB, 2018-2019.

Rawan bencana terjadi di berbagai Daerah di Indonesia, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data dari (BNPB, 2019) bahwa DIY telah mengalami 522 kali bencana alam, dimana bencana yang sering terjadi yaitu tanah longsor (129 kejadian) dan puting beliung (250 kejadian) dengan dampak yang cukup parah mulai dari korban jiwa sampai kerusakan Infrastruktur. Berdasarkan data dan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menemukan ada 12 potensi bencana alam yang bisa terjadi di Kawasan DIY diantaranya gempa bumi, erupsi Merapi, kekeringan, dan teknologi (krjogja,2019).

Kabupaten Bantul menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak banjir dan tanah longsor. Bencana Banjir yang terjadi pada Minggu, 17 Maret 2019. Terdapat 2 korban jiwa meninggal dunia, data dari BPBD DIY mencatat Kabupaten Bantul terdampak paling luas, sekitar 14 kecamatan dan 35 desa yang terdampak bencana. Sekitar 4.427 jiwa mengungsi dan tersebar di 21 titik pengungsian, seperti di Balai Desa dan Masjid (tirto.id, 2019). Sedangkan pada bencana longsor terdapat beberapa zona, di Kecamatan piyungan dan Pleret, Kabupaten Bantul terdapat 3 zona bahaya yaitu zona bahaya rendah dengan pelamparan sekitar 22%, zona bahaya menengah dengan pelamparan sekitar 65% dan zona bahaya tinggi dengan pelamparan sekitar 13% (Nusantara & Setianto, 2015).

Tidak hanya bencana banjir dan tanah longsor, Kabupaten Bantul juga rawan terhadap gempa bumi. Berdasarkan kejadian gempa bumi pada 27 Mei 2006 menguatkan predikat Kabupaten Bantul sebagai wilayah rawan bencana gempa bumi. Sekitar 236.024 rumah rusak dengan rincian 132.432 rumah rusak berat dan roboh, 37.233 rumah rusak sedang dan 55.359 rumah rusak ringan (ugm.ac.id, 2011).

Merujuk pada UU NO 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam Pasal (1) ayat (9) menjelaskan Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana alam. Pada sistem manajemen penanggulangan bencana, koordinasi sangat diperlukan karena bekerja dengan banyak organisasi yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu koordinasi diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat tujuan Rahman, (2016).

Dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dengan berkolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta ataupun Institusi Lokal. Merujuk pada pengertian *Collaborative Governance* bahwa pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan langsung pihak-pihak yang terlibat di luar tatanan pemerintahan, berorientasi konsensus, dan menggunakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan secara kolektif yang bertujuan untuk membuat dan juga melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007).

Masalah yang melatarbelakangi dalam penelitian ini adalah kompleksitas manajemen bencana yang sering menjadi problematika serta mengenai kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Persiapan dan strategi pemerintah dalam mitigasi bencana didukung oleh privat sektor dan teknologi agar manajemen resiko bencana dapat teratasi dengan baik. Salah satu organisasi terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah memiliki unit *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) yang turut aktif dalam penanganan resiko bencana alam. MDMC merupakan Lembaga yang unik, karena di dalam nya terdapat struktur organisasi dari pusat hingga daerah. Oleh karena itu sangat memungkinkan bila MDMC langsung ambil tindakan bagaimana mengatasi masalah kebencanaan di daerah masing-masing. Di sinilah dapat

dilihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan MDMC dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam. Urgensi penelitian ini adalah sebagai solusi dalam manajemen mitigasi bencana agar resiko bencana dapat diminimalisir menggunakan penerapan smart disaster mitigation.

Selain MDMC ada LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama) Lembaga ini merupakan pelaksana kebijakan dan program Nahdatul Ulama dalam bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan [lpbi-nu.org](http://lpbi-nu.org) (2016). Sama halnya dengan MDMC, pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan LPBI NU dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam.

Berdasarkan destinasi wisata di daerah pegunungan yang memiliki kemiringan tinggi menuntut pentingnya pemahaman terkait dengan mitigasi. Oleh sebab itu Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengenalkan mitigasi bencana kepada warga Banjarharjo 2, muntuk, dlingo, Bantul. Program sosialisasi ini dilakukan oleh tim KKN UMY melalui sosialisasi mitigasi dan pelatihan pembuatan papan petunjuk informasi mitigasi. Pelatihan mtigasi bencana diisi oleh Muhammad Hanif dan Hidayat dari MDMC. Keduanya menjelaskan tentang jenis bencana, daerah yang rawan bencana dan cara menangani bencana yang terjadi ([jogja.tribunnews.com](http://jogja.tribunnews.com),2020).

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU) Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelatihan dasar Relawan Siaga Bencana. Peserta pelatihan terdiri dari perwakilan Banom NU seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Ansor, IPNU, dan IPPNU. Pelatihan ini akan terus di tindaklanjuti oleh pengurus, hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi tanggap bagi relawan siaga bencana NU. Bantul

merupakan Kabupaten yang berada di Kawasan rawan bencana, oleh karena itu kehadiran calon relawan yang Tangguh dan siap terjun sangat dibutuhkan (nu.or.id, 2015).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 10 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan organisasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran (bpbd.bantulkab.go.id, 2014).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang dalam penelitian ini terkait dengan Bencana Alam yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tepatnya di Kabupaten Bantul. Serta pengelolaan dan penanggulangan bencana alam. Kemudian dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan atau mengetahui model kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Apakah dengan dilakukannya kolaborasi mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Bantul dalam menghadapi bencana alam. Maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

**Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2019 ?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan khusus :

1. Untuk mendeskripsikan kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mendeskripsikan hasil kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademik**

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai Kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam kegiatan akademik.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam, khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul agar lebih mengetahui apa saja tahapan yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana alam.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Kolaborasi merupakan kerjasama atau interaksi yang melibatkan individu ataupun kelompok baik itu secara langsung maupun tidak langsung guna melaksanakan tujuan tertentu. Penelitian yang pernah dilakukan baik berupa jurnal ataupun skripsi biasanya menjadi bahan referensi bagi peneliti baru.

Yumantoko, (2019) menyatakan bahwa dalam penelitiannya terkait dengan Kolaborasi para pihak dalam penanganan destinasi wisata terdampak bencana di taman nasional gunung rinjani bahwa kolaborasi yang melibatkan banyak pihak dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk gempa bumi di Pulau Lombok terhadap sektor pariwisata. Kolaborasi antar para pihak terutama pemerintah, swasta, dan LSM dalam membentuk masyarakat yang Tangguh dengan bencana menjadi penting untuk dilakukan.

Bustari, (2018) menyatakan bahwa dalam penelitiannya terkait dengan Kolaborasi tingkat sektoral dalam kesiapsiagaan bencana banjir menggunakan gaya kepemimpinan komando non otoriter yang diterapkan ketua SATLAK selama fase tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Aceh tamiang, mampu mempengaruhi dan memotivasi semua Lembaga di sektor pemerintah dan swasta. Namun hal ini tidak berjalan optimal dikarenakan komunikasi yang tidak harmonis diantara Lembaga-lembaga yang memiliki tingkat kewenangan yang sama sebagai akibat dari kurangnya sikap saling menghargai, factor ego sektoral dan arogansi birokrasi.

Agustina, (2017) menyatakan bahwa dalam penelitiannya mengacu pada kolaborasi antara pemerintah DIY dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) DIY mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY saat ini telah dilakukan oleh berbagai multi aktor secara kolaboratif. Kolaborasi antara Pemerintah DIY dengan Forum PRB DIY dibagi kedalam tahapan-tahapan manajemen Penanggulangan bencana, diantaranya sebagai berikut: (a) Kolaborasi aparatur pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam tahapan pra bencana, (b) Kolaborasi aparatur pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam tahapan tanggap darurat, (c) kolaborasi aparatur pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam tahapan pasca bencana.

Rahman, (2016) menyatakan bahwa kehadiran Taruna Siaga Bencana (Tagana) membuat informasi mengenai bencana cepat tersampaikan dan masyarakat juga menjadi tahu tentang kebencanaan. Kerjasama dan hubungan antara Tagana dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap resiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Di Kabupaten Serang



kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan Dinas Sosial merupakan inisiasi dari anggota Tagana di lapangan.

Zaeunuri, (2016) menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata-bencana dapat berproses melalui transformasi dalam perspektif *collaborative governance*. Sesuai dengan konsep dalam penelitian ini maka perspektif *collaborative governance* meliputi *shared vision*, partisipasi, jejaring, dan kemitraan bisa bertransformasi melalui komando, koordinasi, kooperasi dan kolaborasi.

Kususmaratih, (2015) menyatakan bahwa manajemen Desa Tangguh Bencana meliputi 4 tahap, yaitu Perencanaan terdiri dari pembuatan regulasi, menganalisa ancaman bencana, mendata kapasitas desa dan menyusun perencanaan pengurangan resiko bencana. Yang dilakukan oleh FRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana), Palang Merah Indonesia (PMI), dan MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*).

Fitirana, (2014) menyatakan bahwa dalam penelitiannya tentang pembuatan panduan tata kelola pada bidang keamanan informasi dan pemulihan bencana berbasis Cobit 4.1 dan ISO 27002 menghasilkan Panduan Tata Kelola Keamanan dan Aplikasi Audit. Panduan meliputi proses pemantauan dan penanganan menggunakan 3(tiga) control internal, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Panduan tata kelola keamanan yang dibuat digunakan untuk mempercepat proses pemulihan kegiatan operasional yang diakibatkan dari insiden, serta untuk meminimalkan risiko dari insiden. Dan Aplikasi Audit digunakan untuk memantau gangguan yang harus ditangani sesuai prioritas.

Windiani dkk, (2018) menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan mengeksplorasi keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan bencana di Kawasan Gunung Kelud pasca erupsi tahun 2014. Penelitian dilakukan di KRB Gunung Kelud Kabupaten Kediri dengan informan yang berasal dari institusi pemerintah (BPBD), NGO Jangkar Kelud dan Masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca erupsi tahun 2014 upaya pengelolaan bencana yang dilakukan lebih mendayagunakan kapasitas lokal yang ada dikawasan rawan bencana Gunung Kelud. Saat ini kegiatan pengelolaan bencana yang dilakukan adalah mitigasi dan membangun kesiapsiagaan masyarakat di KRB Gunung Kelud. Praktik pengelolaan bencana dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat lokal, BPBD dan LSM Jangkar Kelud. Salah satu program yang dikembangkan adalah “*Sister Village*” (Desa Bersaudara).

Nahar, (2016) menyatakan bahwa penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Pasuruan meliputi semua strategi yang ada dari hasil analisis SWOT, yaitu : (a) Strategi SO (*Strenght-Opportunity*), (b) Strategi ST (*Strenght-Threat*), (c) Strategi WO (*Weakness-Opportunity*), (d) Strategi WT (*Weaknes-Threat*). Pada tahap prabencana, strategi yang digunakan adalah WO, ST, SO. Dan pada tahap tanggap darurat strategi yang digunakan adalah SO, ST. sedangkan pada tahap pasca bencana strategi yang digunakan yaitu SO, WO, dan WT.

Pulungan, (2018) menyatakan bahwa intensitas terjadinya bencana kebakaran di Provinsi Kaltim cukup tinggi meliputi Kabupaten/Kota: Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tenggarong, Sangatta, maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan Peraturan Daerah terkait dengan pencegahan dan pengelolaan bencana kebakaran pemukiman, yang intinya setiap bangunan Gedung wajib memiliki sarana penyelamatan jiwa, berupa proteksi aktif maupun pasif.

Aji, (2015) menyatakan bahwa dalam penelitiannya tentang Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana banjir bandang di kecamatan Welaha Kabupaten Jepara. Populasi penelitian adalah masyarakat yang menjadi korban banjir bandang dengan kondisi relative homogen, dengan jumlah sampel 30 responden (15 warga Desa Welahan dan 15 Warga Desa Ketileng Singolelo) yang dipilih secara acak. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif presentase. Dengan hasil bahwa kesiapsiagaan masyarakat Desa Welahan dan Desa Ketileng Singolelo pada tahap pra bencana tergolong rendah. Pada tahap bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana (rekonstruksi dan rehabilitasi) tergolong sedang.

Bukhari, (2013) menyatakan bahwa dalam penelitiannya terkait dengan hubungan sikap tentang regulasi, pengetahuan dan sikap perawat terhadap kesiapsiagaan bencana gempa bumi di badab layanan umum daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh. Dengan populasi penelitian adalah seluruh perawat pelaksana di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh. Mendapatkan 74 orang dengan menggunakan Purposive Sampling, dengan variabel penelitian terdiri dari variabel independent yaitu sikap tentang regulasi, pengetahuan, sikap perawat dan variabel dependen kesiapsiagaan gempa bumi, yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan chi-kuadrat. Hasil penelitian didapatkan sikap tentang regulasi adalah 8.644, pengetahuan 10.014, dan sikap perawat 13.682. sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara sikap tentang regulasi, pengetahuan, dan sikap perawat terhadap kesiapsiagaan bencana gempa bumi di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh.

Umar, (2013) menyatakan bahwa dalam penelitiannya tentang Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir di Bolapapu Kecamatan Kulawi Sigi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan

pendekatan fenomenologi. Informan dari penelitian ini adalah masyarakat yang sudah pernah mengalami banjir dipilih dengan menggunakan *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* sebanyak 12 orang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif. Dari 12 informan tersebut masih ada yang belum mengetahui tentang banjir, bahkan masyarakatpun belum memiliki kesiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah banjir. Sehingga perlu diberikan pelatihan mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir.

Nartyas, (2013) menyatakan bahwa dalam penelitiannya tentang Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Dengan menggunakan bentuk penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Wedi 54.401 Jiwa. Sampel yang diambil sebanyak 57 penduduk dengan Teknik pengambilan sampel adalah Teknik sampel berstrata sistematis (*Stratified Systematic Sample*). Pengumpulan data menggunakan Teknik angket, Teknik dokumentasi, Teknik observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dan analisis data korelasi.

Husna, (2012) menyatakan bahwa dalam penelitiannya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana di RSUDZA Banda Aceh terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, yaitu: (a) factor pengetahuan terhadap kesiapsiagaan bencana, (b) Sikap terhadap kesiapsiagaan bencana, (c) Kebijakan dan panduan, (c) Rencana untuk keadaan darurat bencana, (d) Sistem peringatan bencana, (e) Mobilisasi sumber daya. Data penelitian di analisis dengan menggunakan *computer software*. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh tingkat pengetahuan terhadap resiko bencana (63,3%), sikap terhadap resiko

bencana (83,3%), Kebijakan dan panduan (73,3%), Rencana untuk keadaan darurat (73,3%), system peringatan bencana (70%), dan mobilisasi sumber daya (86,7%). Dengan semua variabelnya berada pada kategori baik.

Paramesti, (2011) menyatakan bahwa dalam penelitiannya tentang Kesiapsiagaan Masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu Terhadap Bencana Gempa bumi dan Tsunami. Berdasarkan hasil penelitian kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami terbilang dalam kondisi tidak siap jika dilihat dari parameter pengetahuan dan sikap, kebijakan, rencana tanggap darurat, system peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya. Tidak siapnya masyarakat dikarenakan tidak mengetahui kerentanan wilayahnya terhadap bencana.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Jenis Pengelompokan	Temuan Hasil
1	Kolaborasi Pemerintah	Agustina, (2017), Bustari dkk, (2018), Rahman, (2016), Yumantoko, (2019), Zaenuri, (2016) menjelaskan tentang kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dengan Organisasi masyarakat, atau swasta.
2	Tata Kelola Bencana	Windiani dkk, (2018), Nahar, (2016), Pulungan, (2018), Kusumartatih, (2015) menjelaskan tentang pengelolaan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat.
3	Kesiapsiagaan Bencana	Husna, (2012), Aji, (2015), Bukhari dkk, (2013), Paramesti, (2011), Nartyas, (2013) menjelaskan tentang kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam.

Dari hasil pustaka di atas dapat di ambil kesimpulan terkait dengan Kolaborasi Pemerintah dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam. Kolaborasi pemerintah dengan Swasta ataupun LSM sangat berpengaruh bagi masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana menghadapi sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya bencana. Oleh karena itu peran Pemerintah, Swasta, dan LSM sangat diperlukan dalam memberikan pelatihan atau pengetahuan kepada masyarakat agar cepat tanggap dalam menghadapi bencana alam.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

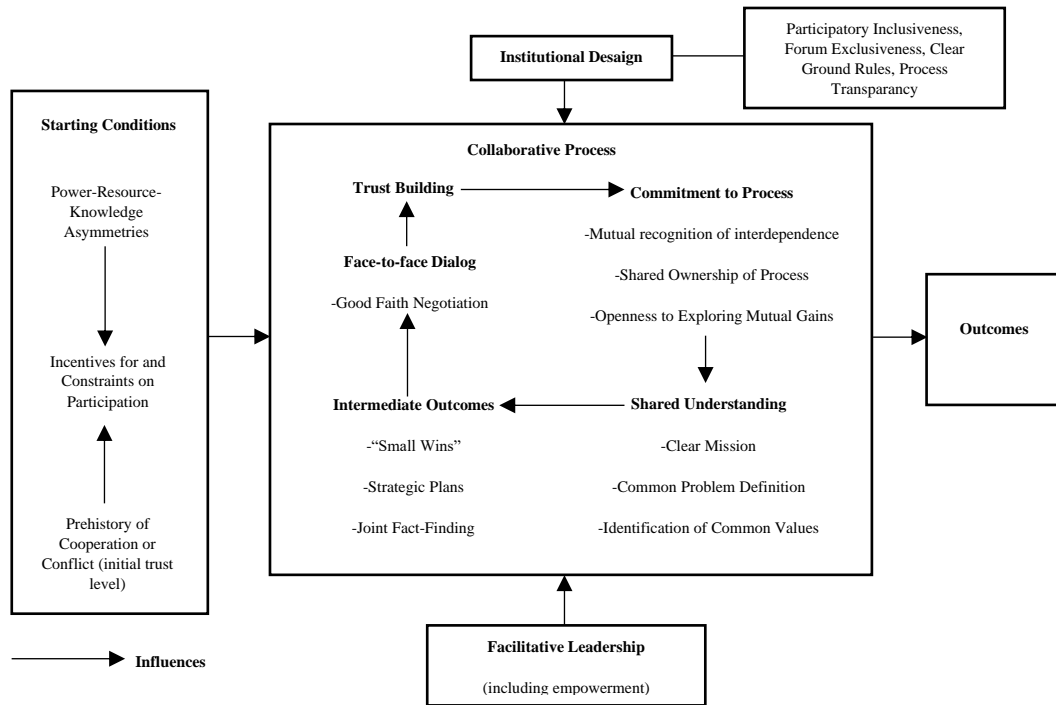
### **1. Kolaborasi Pemerintah (*Collaborative Governance*)**

*Collaborative Governance* merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan langsung pihak-pihak yang terlibat diluar tatanan pemerintahan , berorientasi consensus, dan menggunakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan secara kolektif yang bertujuan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007). Dalam penelitian ini mengambil teori dari Anshell & Gash terkait kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah dengan pihak swasta di karenakan teori ini sudah banyak di pakai di berbagai literasi yang artinya teori tersebut sudah benar-benar terbukti dan sesuai.

*Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba hal tersebut disebabkan adanya inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik umm.ac.id dalam junaidi (2015).

**Gambar 1**

**Model Kolaborasi**



*Sumber: Anshell & Gash, 2007*

Anshell & Gash, (2007) menjelaskan bahwa model di atas memiliki empat variabel yang luas mulai kondisi, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Variabel proses kolaborasi model ini di mulai dengan kondisi, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan sebagai kontribusi atau konteks untuk proses kolaboratif. Kondisi awal mengatur dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau lialibilitas selama kolaborasi. Dalam desain kelembagaan menetapkan aturan dasar dimana kolaborasi mengambil tempat. Dan kepemimpinan menyediakan mediasi yang penting dan fasilitas untuk kolaborasi.

**Tabel 1.2**

**Skala Kolaborasi**

<b>Tingkat Kolaborasi</b>	<b>Yang terlibat dalam kegiatan</b>
Tingkat tertinggi: Komitmen normatif terhadap kolaborasi yang tinggi, sering adanya risiko politik/manajerial yang tinggi	Interaksi transformatif antara pelaku jaringan, yang substantif keterlibatan dan pemberdayaan, mencari pemangku kepentingan tingkat tinggi antar aktor, konsensus dan kerjasama, koalisi di bangun oleh pemerintah dan aktor non-pemerintah
Menengah tingkat tinggi: orientasi normatif yang kuat, dan risiko politik/manajerial tingkat tinggi	Keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat dalam keputusan atau proses kebijakan dan implementasi menentukan kapasitas pengambilan keputusan, inovasi yang lebih kompleks dalam proses penyampaian kebijakan
Tingkat menengah: Komitmen untuk masukan di tingkat risiko politik/manajerial yang moderat	Komitmen formal untuk konsultasi dan kolaborasi antar Lembaga, bergabung dengan strategi pemerintah, keterlibatan formal bersama dan pelatihan inisiatif pendanaan bersama
Sedang tingkat rendah: bentuk operasional kolaborasi untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan, beberapa risiko politik/manajerial	Bentuk kerjasama produksi; perbaikan teknis dalam rantai pengiriman; Bantuan untuk mematuhi kewajiban; konsultasi langsung dengan penerima, sistem pengiriman dan kepatuhan; penggunaan evaluasi yang sistematis data publik melaporkan target yang diinformasikan oleh preferensi penerima
Tingkat rendah: penyesuaian operasional marginal, tingkat risiko politik/manajerial yang rendah	Penyesuaian bertahap dengan menggunakan proses konsultatif; penerima diskusi dan mekanisme umpan balik; mendapatkan informasi tentang kebutuhan/ekspektasi orang lain

*Sumber: Wanna, 2008*

Sambodo dalam (Anshell & Gash, 2007) menyebutkan ada 6 kriteria penting dalam mendefinisikan Collaborative Governance:

- a) Forum di inisiasi oleh badan publik
- b) Peserta forum termasuk organisasi non pemerintah
- c) Peserta terlibat dalam pengambilan kebijakan bukan hanya berperan konsultasi saja
- d) Forum tersebut bersifat formal dan merupakan rapat bersama



- e) Forum tersebut bertujuan mencari mufakat atas kebijakan (walaupun dalam prakteknya mufakat tidak selalu dilakukan)

Amsyari (2018) menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen dalam proses kolaborasi yaitu sebagai berikut :

- a. Diskusi Langsung

Komunikasi salah satu unsur penting dalam proses kolaborasi karena adanya orientasi untuk membentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sehingga dapat membangun model diskusi langsung antar *stakeholder*.

- b. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan menjadi salah satu syarat untuk membangun kolaborasi yang solid antar setiap actor, dalam tahapan ini kolaborasi yang baik tidak hanya membutuhkan negosiasi dalam komunikasi, namun juga tentang membangun kepercayaan diantara pemangku kepentingan.

- c. Komitmen Pada Proses Kolaborasi

Komitmen menjadi tantangan utama dalam kolaborasi, karena dengan adanya komitmen mampu menghilangkan penghambat yang sering muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan dari beberapa aktor.

- d. Pemahaman Bersama

Pemahaman Bersama dapat diartikan sebagai upaya identifikasi dari nilai yang ingin dicapai melalui kesepakatan tentang definisi masalah secara umum.

e. Dimensi Hasil Sementara

Yang dimaksud dengan Dimensi Hasil Sementara adalah suatu hal yang terbentuk di dalam target rencana kerja, rencana strategis yang dapat mendekati pada tujuan yang tepat dan menganggap sebagai hasil proses kritis untuk membangun momentum sehingga menghasilkan kolaborasi yang baik.

Pendapat lain mengemukakan tentang kolaborasi yaitu mengenai model kolaborasi yang di kemukakan oleh Irmadella (2018) yaitu :

a. Kepercayaan atau Legitimasi Internal

Hal ini dapat diartikan sebagai pengakuan dari pihak-pihak internal kolaborasi bahwa aktor-aktor yang terlibat dapat dipercaya dan kredibel dalam melakukan tugas dan perannya. Legitimasi Internal merupakan salah satu hal yang penting karena merupakan elemen untuk membentuk komitmen bersama.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah peran pemimpin selama proses kolaborasi, sebagai penginisiasi kolaborasi yang membangun kepercayaan antar aktor, memfasilitasi dialog para aktor, dan mengeksplor kesamaan tujuan antar aktor.

c. Tujuan Bersama

Tujuan bersama merupakan hasil dari penyatuan tujuan dan pendefinisian permasalahan secara bersama, sehingga meminimalisir terjadinya ketidaksepahaman atau kesalahpahaman diantara *stakeholder*.

d. Aturan Dasar Kolaborasi

Aturan dasar digunakan untuk mengatur kolaborasi sehingga mempunyai arahan yang jelas atau sebagai sesuatu yang digunakan untuk melihat legitimasi proses kolaborasi.

e. Konsensus

Kolaborasi merupakan proses yang *consensus-oriented*. Sehingga untuk mengidentifikasi peluang, tujuan, dan segala tindakan mengutamakan musyawarah untuk dicari kesepakatannya.

f. Komitmen terhadap Proses

Komitmen adalah suatu janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dari tanggungjawan serta tindakan melakukan, menjalankan, tugas dalam kolaborasi.

g. Monitoring

Monitoring dilakukan sebagai bentuk pengawasan, evaluasi, penilaian atas pelaksanaan kolaborasi yang terjalin antar *Stakeholder*.

h. Riwayat Kerjasama

Riwayat Kerjasama menjadi salah satu hal pendukung terjadinya kolaborasi apabila sebelumnya para aktor pernah terlibat dalam suatu kerja sama.

i. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan para aktor dalam kolaborasi.

j. Transparansi

Transparansi dalam kolaborasi digunakan sebagai desain kelembagaan untuk menguatkan legitimasi dan membangun kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Nurjannah, (2014) menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) jenis kolaborasi yang didasarkan pada perbedaan organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu :

1. Kolaborasi Primer

Dalam hal ini grup dan individu menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk pekerjaannya masing-masing, demi seluruh anggota dan grup.

2. Kolaborasi Sekunder

Kolaborasi Sekunder ini sangat diformalisir dan spesialir, kemudian masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian hidupnya kepada grup yang dipersatukan. Sikap orang-orangnya lebih individualis dan mengadakan perhitungan.

3. Kolaborasi Tertier

Dalam Kolaborasi Tertier yang menjadi dasar kolaborasi adalah konflik. Sikap dari pihak-pihak yang kolaborasi adalah murni oportunitis.

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa koaborasi merupakan salah satu unsur dalam strategi negosiasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dari kepentingan yang berbeda pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas tujuan tertentu Soeparna (2013).

Ada beberapa prasyarat dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perusahaan, atau asosiasi Gandasari dkk, (2015) sebagai berikut :

1. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan
2. Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan atau tidak ada dominasi oleh pihak tertentu, setiap actor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati.
3. Terdapat aktor-aktor yang kompeten, yaitu aktor yang memiliki kompetensi berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan kepentingan bersama. Dengan adanya partisipasi aktif dari para aktor pemangku kepentingan yang memiliki kemampuan berdialog yang baik maka kolaborasi akan berjalan dengan lancar.

Dalam penelitian lain Agustina, (2017) menyebutkan bahwa ada beberapa elemen *system context* yang dapat membedakan atau mempengaruhi *Collaborative Governance* yang terbentuk, yaitu :

1. *Resource Condition*, dalam hal ini menjelaskan tentang kondisi sumber daya yang dimiliki apakah perlu diperbaiki, ditingkatkan atau bahkan dibatasi.
2. *Policy an Legal Framework*, kebijakan dan kerangka hukum termasuk administrasi, peraturan atau yudikatif.
3. *Prior Failure to Adrdress Issues*, pelajaran kegagalan masa lalu dapat mengambil pelajaran atas kegagalan di masa lalu masing-masing stakeholder.

4. *Political Dynamic/Power Relations*, dinamika politik atau kekuasaan relasi adalah bagaimana dinamika politik atau kekuasaan relasi yang mempengaruhi jalannya kolaborasi.
5. *Network Connectedness*, hubungan jaringan dapat digolongkan keadaan manajemen jaringan sebuah cara untuk membangun nilai-nilai kepemimpinan dalam tipe relasi antar aktor yang sifatnya horizontal.
6. *Level of Conflict/Trust*, terjadinya konflik antara kepentingan masing-masing pihak yang bekerja sama.

## **2. Kesiapsiagaan Masyarakat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesiapsiagaan berasal dari kata “Siap-Siaga” yang memiliki arti siap untuk digunakan atau untuk bertindak. Kemudian jika ditambahkan imbuhan “Ke-an” menjadi Kesiapsiagaan yang memiliki arti keadaan siapsiaga.

Dalam UU No. 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 7 menjelaskan Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Resti, (2017) juga menyatakan bahwa kesiapsiagaan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi suatu bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif pada saat dan setelah terjadinya bencana.

Menurut (Bnpb, 2017) ada beberapa dalam menyusun rencana latihan kesiapsiagaan (aktivasi sirine dan evakuasi mandiri) yang melibatkan populasi dilingkungan tempat tinggal, kantor, sekolah, area publik, dan lain sebagainya. Rencana latihan tersebut berisi :

1. Tujuan, Sasaran, dan waktu pelaksanaan latihan kesiapsiagaan
2. Jenis ancaman yang dipilih atau disepakati untuk latihan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan. Sebaiknya, latihan disesuaikan dengan ancaman di wilayahnya masing-masing.
3. Membuat skenario latihan, skenario merupakan acuan cerita kejadian yang di pakai untuk keperluan latihan. Skenario ini dibuat berdasarkan kejadian yang paling mungkin terjadi di desa.
4. Menyiapkan atau mengkaji ulang SOP/Protap yang sudah ada yaitu memastikan kembali. Memastikan beberapa area atau tempat alternative yang akan dijadikan sebagai pusat evakuasi, tempat pengungsian maupun tempat perlindungan sementara. Tempat yang bisa di manfaatkan seperti kantor, sekolah, tempat ibadah dan lain sebagainya.
5. Menentukan tempat pengungsian yang dipilih setelah mempertimbangkan kapasitas ketersediaan logistic (seperti makanan atau minuman, pakaian, obat-obatan dan peralatan medis, keperluan mandi, peralatan kebersihan, bahan bakar dan lain sebagainya), serta ketersediaan fasilitas umum.
6. Menetapkan dan menyiapkan jalur evakuasi, dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut :
  - a. Jalur evakuasi yang merupakan rute tercepat dan teraman bagi pengungsi menuju tempat pengungsian.
  - b. Rute alternative selain rute utama
  - c. Kesesuaian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat pengungsian.

- d. Kelengkapan sumber daya termasuk ketersediaan kendaraan yang bisa digunakan dalam proses evakuasi. Penting juga mempertimbangkan posisi kendaraan dan jumlah minimum muatan jika dibutuhkan.
  - e. Peta evakuasi berdasarkan hasil survei dan desain yang menginformasikan jalur evakuasi, tempat pengungsian dan waktu untuk mencapainya, jalur alternative, lokasi-lokasi aman bencana, serta posisi posko siaga tim evakuasi.
7. Orientasi sebelum latihan
- a. Sosialisasi untuk mendapatkan pembelajaran terbaik, seluruh peserta dan pelaksana yang terlibat perlu memahami tujuan dari latihan. Tidak dianjurkan membuat latihan tanpa kesiapan yang baik dan peserta latih maupun pelaksana.
  - b. Perkenalkan kembali pemahaman resiko bencana di lingkungan, sebelum dan sesudah latihan dilakukan.
  - c. Sampaikan tujuan latihan, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan.
  - d. Himbau pentingnya keterlibatan aktif dan keseriusan semua pihak dalam mengikuti latihan.
  - e. Sampaikan tanda bunyi yang akan digunakan dalam latihan dalam latihan, tanda latihan dimulai, tanda evakuasi, tanda latihan berakhir. Pastikan seluruh peserta memahami tanda ini.
8. Dalam melaksanakan latihan, yang akan melakukan simulasi juga dapat mengundang pengamat atau observer untuk membantu memberikan masukan dan umpan balik proses latihan, untuk perbaikan kedepan.



9. Perencanaan Dokumentasi, Bagian penting lainnya dari kegiatan latihan menghadapi kesiapsiagaan adalah dokumentasi. Dalam hal ini diperlukan berbagai macam dokumentasi sebagai salah satu alat untuk pelaporan ataupun monitoring dan evaluasi. Dokumentasi dilakukan pada keseluruhan tahapan kegiatan penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan hingga selesainya pelaksanaan simulasi bencana. Kegiatan dokumentasi tidak hanya mencakup foto dan video tetapi juga mencakup laporan, dokumen-dokumen output termasuk peta-peta, surat edaran, manual latihan/SOP, dokumen skenario dan SOP simulasi, formulir evaluasi, kumpulan catatan masukan, rencana perbaikan dan tindak lanjut, ringkasan laporan dan rekomendasi.

Kesiapsiagaan merupakan salah satu tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi situasi bencana secara cepat dan tepat Rini & Sudarsono, (2013). Penerapan kesiapsiagaan bencana tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung, terutama bagi petugas kesehatan Husna, (2012).

Solikhah dkk dalam (LIPI & ISDR, 2006) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator dalam kesiapsiagaan yang ada diantaranya yaitu pengetahuan masyarakat terhadap kejadian alam dan bencana longsor lahan, pengetahuan masyarakat terhadap kerentanan fisik lingkungan, sikap dan kepedulian masyarakat terhadap resiko bencana.

**Tabel 1.3**

**Indikator Kesiapsiagaan Terhadap bencana**

<b>No.</b>	<b>Kesiapsiagaan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aspek</b>
<b>1</b>	Sebelum Terjadinya Longsor lahan	Pengetahuan dan Sikap	a. Kejadian alam dan bencana b. Kerentanan fisik lingkungan c. Sikap terhadap resiko bencana d. Rencana Evakuasi
<b>2</b>	Saat Terjadinya Longsor lahan	Perencanaan Kedaruratan	e. Pertolongan pertama, penyelamatan, keselamatan dan keamanan
<b>3</b>	Sesudah Terjadinya Longsor lahan	Sistem Peringatan Bencana Mobilisasi Sumber Daya	f. Tradisional lokal/teknologi modern g. Sumber Daya manusia dan Pendanaan

*Sumber : Solikhah dkk dalam (LIPI & ISDR, 2006)*

Upaya kesiapsiagaan sangat bermanfaat dalam berbagai situasi bencana.

Ada beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan (BNPB, 2017) :

1. Memahami bahaya di sekitar anda
2. Memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian.
3. Memiliki keterampilan untuk mengevakuasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri.
4. Memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekan rencana tersebut dengan latihan.
5. Mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi.
6. Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

Kepala (Bnpb.co.id, 2019) menyatakan bahwa penting nya kesiapsiagaan terhadap bencana untuk mengurangi terjadinya korban. Jatuhnya korban dapat diminimalisir dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat.

Ferbiana dkk, (2015) menyebutkan bahwa ada beberara upaya yang dapat dilakukan dalam kesiapsiagaan, yaitu :

1. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukung
2. Pelatihan siaga/simulasi bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum)
3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
4. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistic
5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung tugas kebencanaan
6. Penyiapan dan pemasangan sistem *early warning*
7. Penyusunan *Contingency plan*
8. Mobilisasi Sumber daya

Pengetahuan terkait dengan kesiapsiagaan dipengaruhi oleh factor usia, semakin bertambah usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya akan semakin baik Utama dkk, (2019). Kemudian menurut Utama dkk dalam (Dantzler, 2013) menyebutkan bahwa individu anatar usia 18-54 tahun memperlihatkan pengetahuan dalam menghadapi bencana yang lebih baik.

### 3. Bencana Alam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Sedangkan kalau Belanca Alama adalah kerusakan atau kejadian yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin besar, banjir, dll.

Bencana alam menurut UU No 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Dalam UU No 24 tahun 2007 juga menjelaskan tentang bencana non alam dan bencana sosial. Bencana non alam di jelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian penjelasan tentang Bencana sosial tertera di pasal 1 ayat 4 yang menjelaskan bahwa bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Resti, (2017) menyebutkan ada 3 (tiga) aspek dasar dalam bencana, yaitu :

1. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam atau merusak
2. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi masyarakat
3. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka

Ada beberapa jenis-jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia (bnpb.go.id, 2017) yaitu :

1. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi hal ini disebabkan karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhannya batuan.

2. Letusan Gunung Api

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya dari letusan gunung api berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

3. Tsunami

Tsunami berasal dari Bahasa Jepang yang memiliki arti gelombang ombak lautan “tsu” berarti lautan, “nami” berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.

4. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

5. Banjir

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Bencana merupakan gangguan serius yang dihadapi oleh masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan, baik oleh masyarakat berbagai

material dan lingkungan (alam), dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada Hediarto (2016). Harwianthy, (2013) menyatakan bahwa bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi alam yaitu peristiwa fisik seperti letusan gunung api, tanah longsor, gempa bumi dan juga karena aktivitas manusia.

Arianti dalam (Zapata & Marti, 1997) menyatakan bahwa ada beberapa dampak bencana alam dalam tataran sistem sosial ekonomi yaitu :

1. *Direct Damages* (kerusakan langsung)

Hal ini meliputi semua kerusakan pada aset tetap, modal dan persediaan barang jadi dan setengah jadi, bahan baku dan suku cadang yang terjadi secara bersamaan sebagai konsekuensi langsung. Dalam tahap ini menyangkut pengeluaran untuk bantuan darurat.

2. *Indirect Damages* (kerusakan tidak langsung)

Dalam hal ini dampak yang dialami lebih dari pada arus barang yang tidak akan diproduksi dan jasa yang tidak akan diberikan setelah bencana. Kerusakan tidak langsung ini dapat meningkatkan pengeluaran operasional karena rusaknya infrastruktur. Biaya yang bertambah pada penyediaan layanan alternative (cara produksi, distribusi, dan penyediaan barang dan jasa).

3. *Secondary Effect* (dampak sekunder)

Dalam hal ini meliputi dampak kerja ekonomi secara keseluruhan yang di ukur melalui variabel ekonomi makro yang paling signifikan. Variabel yang relevan dapat Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencakup keseluruhan dan sektoral.

Ada beberapa potensi kerugian yang muncul akibat adanya bencana alam yang terjadi Arianti, (2011).

**Tabel 1.4**

**Potensi Kerugian Akibat Bencana Alam**

<b>No.</b>	<b>Akibat</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Kerugian Berwujud</b>	<b>Kerugian Tidak Berwujud</b>
<b>1</b>	Kematian	Jumlah Orang	Kerugian individu yang aktif secara ekonomi	Dampak sosial dan psikologis pada komunitas yang tersisa
<b>2</b>	Cidera	Jumlah dan keperluan cidera	Kebutuhan perawatan medis, dan kerugian sementara aktivitas ekonomi oleh individu yang produktif	Pemulihan dampak sosial dan psikologis
<b>3</b>	Kerusakan Fisik	Inventarisasi elemen yang rusak, dengan jumlah dan tingkat kerusakan	Penggantian dan perbaikan	Biaya kerugian kerusakan budaya
<b>4</b>	Tindakan Darurat	Volume tenaga kerja, peralatan dan sumber daya hari kerja yang dipekerjakan	Mobilisasi biaya, dan kemampuan kesiapan investasi	Penanggulangan stress korban bencana
<b>5</b>	Gangguan Terhadap Ekonomi	Jumlah hari kerja yang hilang, volume produksi yang hilang	Nilai produksi yang hilang	Peluang, daya saing, reputasi
<b>6</b>	Gangguan Sosial	Jumlah pengungsi dan tunawisma	Perumahan sementara, bantuan, kemampuan produksi masyarakat secara ekonomi	Psikologis, kontak sosial
<b>7</b>	Dampak Lingkungan	Skala dan keparahan	Biaya perbaikan	Konsekuensi dari lingkungan yang buruk, resiko kesehatan, resiko

				bencana dimasa depan
--	--	--	--	-------------------------

*Sumber : Arianti dalam (Bull, 1994)*

Bencana alam memang tidak tahu kapan akan terjadi, namun Pemerintah maupun masyarakat harus menyiapkan atau siapsiaga apabila bencana alam datang tiba-tiba. Pemerintah sendiri sudah mengantisipasi dengan berbagai mitigasi bencana yang disediakan untuk masyarakat dalam hal ini pemerintah dan masyarakat harus saling kerja sama agar tidak mengakibatkan korban jiwa jika bencana alam terjadi.

### **G. Definisi Konseptual**

Dengan beberapa konsep yang sudah di uraikan dalam hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka untuk lebih mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian di susun definisi konseptual yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kolaborasi Pemerintah merupakan suatu konsep kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak lain guna mencapai tujuan yang sama.
2. Kesiapsiagaan Masyarakat merupakan sebuah konsep dalam mengatasi bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan secara tepat dan efektif pada saat dan setelah terjadinya bencana.
3. Bencana Alam merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

### **H. Definisi Operasional**

Berdasarkan data serta teori yang sudah di paparkan secara empiris maka definisi operasional dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah di kemukakan sebelumnya. Berikut ini beberapa tahapan untuk melakukan



kolaborasi Pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam berdasarkan teori dari Anshel & Gash, (2007), Solikhah dkk dalam (LIPI & ISDR, 2006)

**a) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)**

- 1) Diskusi langsung antara BPBD Kabupaten Bantul dengan MDMC, dan LPBI NU terkait peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.
- 2) Negosiasi program yang akan dilakukan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul antara BPBD Kabupaten Bantul dengan MDMC, dan LPBI NU.

**b) Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)**

- 1) Kerja sama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.
- 2) Kepemilikan Bersama atas proses kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah dengan pihak Swasta dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.
- 3) Keterbukaan dalam proses kolaborasi yang terjalin antara BPBD Kabupaten Bantul dengan MDMC, dan LPBI NU dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.

**c) Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)**

- 1) Misi yang jelas dalam proses kolaborasi yang terjalin antara BPBD Kabupaten Bantul dengan MDMC, dan LPBI NU dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam.

- 2) Definisi Masalah/pemahaman Bersama antara pemerintah dengan pihak swasta terkait kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Bantul.
- 3) Identifikasi kesepakatan yang ingin di capai dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Bantul.

**d) Hasil menengah (*Intermediate outcomes*)**

- 1) Pencapaian dari hasil kolaborasi antara BPBD Kabupaten Bantul dengan MDMC, dan LPBI NU terkait peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.
- 2) Rencana Strategis terkait program antara BPBD Kabupaten Bantul dengan MDMC, dan LPBI NU dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.
- 3) Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.

## **I. Metode Penelitian**

Dalam metode terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu dengan cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menciptakan data dan tujuan dan kegunaan pada penelitian. Metode penelitian biasanya digunakan untuk merancang pekerjaan yang akan dilaksanakan sebelumnya, ketika, dan sesudah pengumpulan data secara sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (Flyvbjerg, 2011: 301-316; Yin, 2014: 27-70). Penelitian kualitatif mengkaji dokumen UU Kebencanaan dan regulasi terkait serta wawancara dengan para responden (Kamberelis & Dimitriadis, 2011: 545-561; Patton, 2014: 4, 293, 343-344). Penelitian ini menggunakan

kualitatif karena ingin mendapatkan data secara langsung dari responden/narasumber.

Dalam penelitian ini mengambil data dan mencermati tulisan-tulisan yang terkait dengan kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam yang terjadi. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi serta mengetahui pendapat serta pandangan terhadap objek penelitian untuk mengeksplorasi pengalaman, pendapat serta pandangan terhadap objek penelitian yang meliputi pengalaman informan dalam menyikapi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Jadi dapat disimpulkan, penelitian dengan menggunakan metode tersebut dapat menghasilkan suatu data deskriptif mengenai kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dengan pihak lain dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam di kabupaten Bantul.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan yang menjadi titik pengambilan data penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, MDMC, dan LPBI NU.

## **3. Sumber Data**

### **a) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud merupakan data hasil dari wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan

bersedia memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait dengan Kolaborasi Pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam di kabupaten Bantul.

**Tabel 1.5**  
**Data Primer Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Data Yang Dibutuhkan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
<b>1</b>	Kolaborasi Pemerintah	Langkah-langkah pembuatan kesepakatan kolaborasi  Implementasi Kolaborasi terkait kebencanaan	Dinas terkait dan Swasta	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
<b>2</b>	Kesiapsiagaan Masyarakat menghadapi Bencana Alam	Pengetahuan Masyarakat terkait bagaimana menghadapi Bencana Alam	Dinas terkait dan Swasta	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku, atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, atau arsip, laporan, yang bersumber dari Lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung yang terkait dengan Kolaborasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.

**Tabel 1.6**

**Data Sekunder Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Sumber</b>
<b>1</b>	Surat Keputusan (SK) atau M.O.U kolaborasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten bantul, MDMC dan LPBI NU
<b>2</b>	Arsip Data Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul
<b>3</b>	Artikel, Jurnal, berita terkait dengan Kolaborasi Pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat menghadapi Bencana Alam	Pihak Ketiga

**4. Unit Analisi Data**

Sehubungan penelitian ini mengkaji tentang Kolaborasi pemerintah dalam kesiapsiagaan bencan alam maka unit analisis data dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, MDMC dan LPBI NU Serta Komunitas/LSM bidang kebencanaan.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Gustian (dalam Sugiono, 2015) menyatakan Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, kerana tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka penliti tidak akan mendapatkan data yang menenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu :

a) Studi Kepustakaan

Metode ini merupakan Teknik pengumpulan data yang dihasilkan dari berbagai sumber penelitian dengan menelaah dan menganalisis data-data sekunder dari laporan penelitian, jurnal,

buku, koran, *website*, maupun berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kolaborasi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Bantul.

b) Wawancara

Gustian (dalam Basrowi & Muhammad, 2015) menyatakan wawancara yang dimaksud adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban. Wawancara merupakan salah satu Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka dan mengadakan tanya jawab kepada informan.

**Tabel 1.7**

**Tabel Informan/narasumber**

<b>No.</b>	<b>Lembaga/Instansi</b>	<b>Nama Informan/Narasumber</b>	<b>Keterangan</b>
1	BPBD Kab. Bantul	Bpk. Bambang Nugroho	Bidang I Pencegahan & Kesiapsiagaan
2	MDMC	Bpk. Budi Santoso	Koordinator Divisi Pengurangan Risiko Bencana & Kesiapsiagaan
3	LPBI NU	Bpk. Furqon	Ketua LPBI NU Kab. Bantul

c) Dokumentasi

Metode ini merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan Gustian (dalam Basrowi & Muhammad, 2015). Melalui Teknik dokumentasi ini akan diamati fenomena dari objek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian.

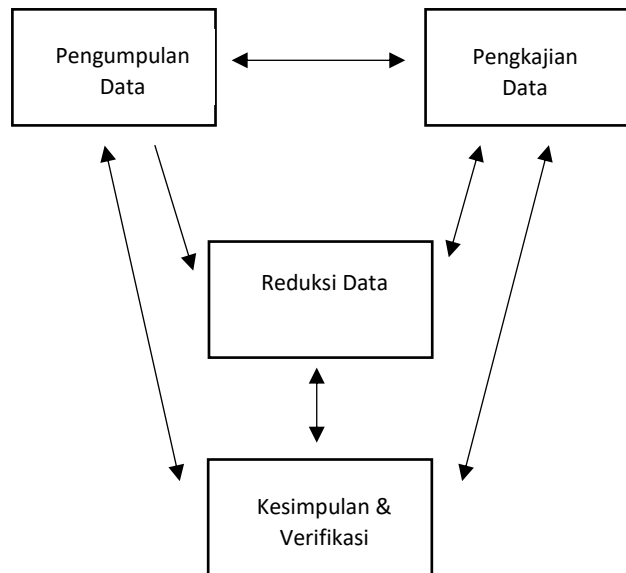
**6. Teknik Analisis Data**

Hadi dalam Gustian, (2019) data yang telah diperoleh melalui wawancara, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara induktif terhadap data yang ada. Metode induktif adalah jalan berfikir dengan cara mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Mengenai kolaborasi yang dilakukan dari pihak pemerintah yaitu BPBD Kab. Bantul dengan pihak swasta MDMC dan LPBI NU dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam di Kabupaten Bantul yang diperoleh dari berbagai sumber akan di analisis secara mendalam dengan logika dan di sikapi dengan akan sehat yang terkait dengan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam di Kabupaten Bantul yang berdampak pada meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait

dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam prosedur analisisnya adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Komponen Analisis Data Model Interaktif**



Sumber : di adopsi dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992, dalam Gustian, 2019)

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan metode data yang di peroleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.



c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah di reduksi dan di sajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah di pahami.

d. Matrik kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah di reduksi dalam laporan, dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin di capai.